

**PERANAN METODE DISKUSI DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER
MAHASISWA MELALUI MATA KULIAH PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN (PKn)**

Edi Saputra

Dosen UPT-MKU Universitas Negeri Padang
edi_saputra@yahoo.co.id

ABSTRACT

In the current civics lesson, students often experience boredom and tends to just lecture to simply look for value alone. This is due to the material being taught monotonous, theoretical, cognitive nature, even verbalistic. In the course it appears that the students just come, sit down, shut up and go home and some have fallen asleep. Although the discussion of the methods applied in lectures, but students and lecturers are more likely to lead to the questioning, rarely exchanging information, let alone understanding, not able to analyze and comment on the information that is different, and not many are active but more so the audience, so the ability critical thinking and interpersonal skills difficult to achieve. This resulted in "disruption" process of character formation of students as embodied the vision, mission, and goals of the Civic Education. For that one of the efforts is to develop a simple method and a simple discussion, starting from the preparation phase, the implementation phase and the closing phase.

Keywords: *Development, Discussion Method, Citizenship Education, Student Character*

ABSTRAK

Saat ini dalam pembelajaran PKn, mahasiswa sering mengalami kejenuhan dan cenderung hanya kuliah untuk sekedar mencari nilai saja. Hal ini disebabkan materi yang diajarkan cenderung monoton, teoretik, bersifat kognitif, bahkan verbalistik. Dalam perkuliahan tampak bahwa mahasiswa hanya sekedar datang, duduk, diam dan pulang (istilahnya D3P) bahkan ada yang tertidur. Walaupun dalam perkuliahan diterapkan metode diskusi, tetapi mahasiswa dan dosen lebih cenderung mengarah pada tanya-jawab, jarang saling bertukar informasi, apalagi saling memahami, tidak sanggup menganalisis dan mengomentari informasi yang berbeda, dan tidak banyak yang aktif tetapi lebih banyak jadi penonton, sehingga kemampuan berpikir kritis dan kecakapan interpersonal sulit dicapai. Hal ini berdampak pada "terganggunya" proses pembentukan karakter mahasiswa sebagaimana terkandung visi, misi, dan tujuan dari PKn tersebut. Untuk itu salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan metode diskusi yang sederhana dan simpel, dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutupan.

Kata Kunci : *Pengembangan, Metode Diskusi, Pendidikan Kewarganegaraan, Karakter Mahasiswa*

A. Pendahuluan

Samsuri¹ dalam disertasi doktornya menemukan bahwa mata pelajaran PPKn (berdasarkan Kurikulum 1994) lebih banyak menimbulkan kejenuhan dan membosankan bagi peserta didik. Hal ini disebabkan, materi yang diajarkan cenderung monoton, teoretik, kognitif, bahkan verbalistik. Dalam prakteknya di lapangan tampak sekali ada gejala keinginan untuk menolak pembelajaran PPKn yang semata-mata menampilkan nilai moral. Di sisi lain PPKn kehilangan akar akademisnya karena tidak ada teori-teori keilmuannya yang memadai sebagaimana ilmu politik.

Temuan ini jika dicermati sinkron dengan fenomena yang tampak pada proses pembelajaran PPKn di perguruan tinggi dalam membentuk karakter mahasiswa. Mata kuliah PPKn yang merupakan salah mata kuliah umum (MKU) dan wajib diikuti oleh mahasiswa, cenderung dianggap hanya sekedar mencari nilai saja, tidak ada gunanya untuk dipahami, apa lagi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada proses belajar mengajar (PBM) tampak bahwa mahasiswa hanya sekedar datang, duduk, diam, dan pulang dengan istilah D3P, bahkan ada yang tertidur. Mahasiswa datang kuliah tidak dengan persiapan yang

baik. Banyak diantara mereka tidak membawa bahan perkuliahan (buku-buku) bahkan catatan dan pena pun mereka tidak punya.

Kondisi ini menurut A. Azis Wahab² dalam penelitiannya terhadap guru-guru PPKn di Kab. Sukabumi, Kab. Garut, Kab. Bandung, dan Kota Bandung menemukan bahwa guru pada umumnya berpendapat materi PPKn begitu padat atau luas dan kurang praktis dengan alokasi waktu yang terbatas. Hal ini berdampak pada penggunaan metode belajar. Dimana, guru pada umumnya hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dengan pemberian tugas. Penggunaan alat peraga sangat minim dan terbatas pada pembelajaran model *talk dan chalk* (hanya ceramah dan menulis di papan tulis). Akibatnya, mata pelajaran PPKn membosankan dan akhirnya direndahkan.

Dari dua temuan di atas tampak bahwa ada dua variabel besar yang mengganggu proses pembelajaran PPKn tersebut yakni materi dan metode pembelajaran. Dari segi materi menurut A. Aziz Wahab³ materi PPKn meskipun mengemban amanat untuk membentuk warga negara yang baik, tetapi pemilihan atau penggunaan materi (konten) PPKn dominan dengan muatan kepentingan politik rezim. Sementara itu dari segi metode di lapangan, sebagian besar

¹ Samsuri. 2010. "Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi PPKn di Indonesia: Studi Pengembangan Kebijakan PPKn pada Jejang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi". *Disertasi* Tidak Diterbitkan. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

² A. Azis Wahab. 1999. "Kurikulum PPKn 1994: Isu dan Permasalahan untuk Penyempurnaan" *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Th. Ke-5, No. 18, hal. 49 - 59.

³ *Ibid*

guru banyak menggunakan cara, model, dan pendekatan doktrinisasi pada peserta didik. Hal ini dipengaruhi oleh rezim yang berkuasa yang mereka peroleh pada waktu pelatihan-pelatihan ataupun seminar-seminar yang diadakan oleh pemerintah. Ini berdampak pada penerapan metode pembelajaran PPKn tersebut sehingga misi PPKn untuk membentuk warga negara yang berkarakter, demokratis, partisipatif, dan kritis jauh dari harapan.

Saat ini, pembelajaran PKn lebih dominan pada menerapkan metode diskusi. Menurut Sugeng⁴ metode diskusi berarti proses bertukar pikiran antara dua orang atau lebih tentang suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan penggunaan metode diskusi menurut Diana Hess⁵ adalah untuk membentuk kemampuan berpartisipasi guna memecahkan masalah-masalah dalam suatu masyarakat demokratis dengan cara berdiskusi. Melalui diskusi dikembangkan *rationale* dan *instrumental rationale*, berupa pengembangan nilai, kepastian dan mempertinggi pemahaman terhadap isi (konten) kajian. Harapannya dari model ini adalah untuk dapat

membantu mahasiswa mengembangkan suatu pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai demokratis, meningkatkan kemauannya untuk ikut dalam kehidupan politik dan secara positif mempengaruhi isi pemahaman, kemampuan berpikir kritis, dan kecakapan-kecakapan interpersonal.

Akan tetapi dari pengalaman penulis, baik semasa kuliah maupun saat mengajar di perguruan tinggi tampak permasalahan yang mendasar bahwa dalam penerapan metode diskusi ini dalam perkuliahan adalah untuk membentuk karakter bangsa, dimana dalam diskusi baik mahasiswa maupun dosen lebih mengarah pada tanya-jawab, jarang saling bertukar informasi, apalagi saling memahami informasi, tidak sanggup menganalisis dan mengomentari informasi yang berbeda, tidak banyak yang aktif tetapi lebih banyak jadi penonton, sehingga kemampuan berpikir kritis dan kecakapan-kecakapan interpersonal sulit dicapai.

Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana PKn menjadi mata kuliah yang mudah dipahami, menyenangkan, dan tidak membosankan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode diskusi yang tidak mengarah pada metode tanya jawab. Metode diskusi yang dikembangkan adalah kemampuan bertukar informasi, menyampaikan ide, berfikir kritis dan tanggap terhadap permasalahan dari peristiwa, fakta dan informasi yang diperoleh, kemudian sanggup menggeneralisasikannya yang akhirnya menjadi suatu 'nilai' dalam membentuk karakter. Selain itu dalam

⁴ Sugeng Paranto. 1981. *Teknik Diskusi dan Aspek-aspek yang Perlu Diperhatikan Dalam Pelaksanaannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

⁵ Hess, Diana. 2001. "Teaching to Public Controversy in a Democracy". Bloomington, IN: ERIC. *Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education*, International Civic Education and Civitas, pp. 87-109.

metode diskusi juga dianalisis materi perkuliahan dengan teori, contoh, fakta atau peristiwa yang terjadi baik maupun buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian menganalisisnya bersama-sama.

B. Hakekat PKn Dalam Membentuk Karakter Bangsa

Pada tahun 2013 terjadi perubahan kurikulum, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Perubahan ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 tahun 2012, bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyusunan kurikulum. Namun pada pelaksanaannya diperlukan rambu-rambu yang sama agar dapat mencapai hasil yang optimal. Perubahan ini disesuaikan dengan potensi, keunggulan dan kemampuan perguruan tinggi tersebut dengan memperhatikan kondisi mahasiswa secara umum di perguruan tinggi. Mahasiswa merupakan insan dewasa, sehingga dianggap sudah memiliki kesadaran dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan atau professional.

Sehubungan dengan itu, maka perubahan pada proses pembelajaran menjadi penting dan akan menciptakan iklim akademik yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa baik *hardskills* maupun *softskills*. Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Tinggi dalam UU No. 12 tahun 2012 yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri

trampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, seluruh mahasiswa harus mengikuti pembelajaran mata kuliah dasar umum yang dikenal dengan MKDU (*general education*). Sebagian dari MKDU telah dinyatakan dalam UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 35 sebagai mata kuliah wajib, yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Dalam rangka menyempurnakan capaian pembelajaran, maka MKDU ditambah dengan bahasa Inggris, Kewirausahaan, dan mata kuliah yang mendorong pada pengembangan karakter lainnya, baik yang terintegrasi maupun individu.

Dimensi Pembelajaran PKn Dalam Membentuk Karakter Bangsa

Saat ini reformasi telah bergulir, namun hingga saat ini bangsa dan negara Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang serius diantaranya adalah korupsi yang semakin meningkat, rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, lemahnya penegakan hukum, meningkatnya potensi disintegrasi karena meningkatnya semangat primordialisme, perselisihan ideologi, politik, agama, dekadensi moral, kemiskinan dan pengangguran, serta makin rusaknya lingkungan hidup, semakin mengancam kelanggengan persatuan bangsa Indonesia, dan yang sangat memcemaskan sekali adalah permasalahan karakter anak bangsa⁶

⁶ Siswono Yudohusodo. 2005. *Pancasila, Globalisasi, dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.

Permasalahan karakter bangsa Indonesia secara umum tampak pada hilangnya karakter yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik. Khusus pada mahasiswa, terjadinya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, seks bebas, kriminalitas, terjebak pada terorisme dan paham yang sesat terhadap agama. Sementara itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat tidak lagi berorientasi atau dijiwai oleh Iman dan Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa⁷.

Mencermati situasi kehidupan kebangsaan yang demikian, bagi dunia pendidikan tidak ada pilihan lain kecuali melakukan upaya pro-aktif pembinaan nasionalisme untuk menggugah semangat kebangsaan dan kecintaan pada tanah air para peserta didik sebagai generasi muda penerus bangsa. Dengan pembinaan nasionalisme atau kebangsaan melalui proses dan metode pembelajaran PKn yang efektif diharapkan peserta didik memperoleh wawasan kebangsaan yang luas, sehingga mampu memahami dan menyikapi dinamika persoalan kebangsaan yang terus berkembang, serta menumbuhkan jiwa kemandirian dan rasa kecintaan pada tanah air.

⁷ Gunaryadi. 2012. "Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan Nasional". *Ceramahan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan*. Jakarta: 24 September 2012.

Untuk itu PKn menjadi sangat urgen di tengah situasi kehidupan bangsa dan negara Indonesia saat ini. Untuk membentuk karakter mahasiswa tersebut, perlu dikembangkan substansi kajian dan model pembelajaran serta sistem evaluasi yang memungkinkan pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi berjalan efektif dalam membentuk mahasiswa berkarakter.

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Begitu urgennya dimensi PKn ini dalam membentuk karakter mahasiswa maka PKn termasuk kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di perguruan tinggi yang berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila⁸. Sesuai dengan fungsinya tersebut, PKn menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan

⁸ Koento Wibisono. 2006. "Revitalisasi dan Reorientasi MPK". *Makalah Simnas III Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta, 2006.

UUD 1945 sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya (UU No 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 3)

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk merealisasikan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan maka pembelajaran PKn semestinya berusaha mewujudkan peserta didik untuk memiliki kemampuan:

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- b. Berpartisipasi secara aktif, bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia Pancasila agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi⁹.

Jika dicermati tujuan pembelajaran PKn tersebut memiliki tiga bentuk komponen kompetensi kewarganegaraan, yaitu; *civic knowledge*, *civic skills* yang memuat kecakapan intelektual dan partisipatori, dan *civic*

dispositions. Dalam tiga bentuk inilah seharusnya PKn difokuskan, misalnya saja dalam permasalahan korupsi, peserta didik harus dibimbing berfikir kritis dalam memahami korupsi dan mempunyai skill untuk mengatasi masalah tersebut sehingga mampu berpartisipasi membrantas korupsi.

Capaian Pembelajaran PKn

Dari tiga bentuk komponen kompetensi kewarganegaraan tersebut sebenarnya yang ingin dicapai oleh PKn adalah:

- a. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air;
- b. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung demokrasi berkeadaban;
- c. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan keragaman.

Substansi Kajian PKn dalam Membentuk Karakter Bangsa

Kembali ditegaskan bahwa MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian) sebagai pendidikan nilai di Perguruan Tinggi dalam membentuk

⁹ Kementerian Pendidikan Nasional RI. 2006. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional RI.

Tabel 1
Subtansi Kajian Pokok PKn dalam Membentuk Karakter Bangsa

Kompetensi Dasar	Subtansi/ Pokok Kajian	Materi / Sub Materi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengantarkan mahasiswa sebagai peserta didik mampu memahami konsep dasar, sejarah perkembangan, landasan filosofis, historis, yuridis dan sosiologis Pendidikan Kewarganegaraan 2. Mengantarkan mahasiswa sebagai peserta didik mampu memahami arti pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan. 3. Menumbuhkembangkan kesadaran mahasiswa sebagai peserta didik mampu memahami tujuan pembelajaran PKn 	Hakekat PKn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Dasar dan sejarah Perkembangan PKn 2. Landasan filosofis, historis, yuridis dan sosiologis Pendidikan Kewarganegaraan 3. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan 4. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengantarkan mahasiswa sebagai peserta didik mampu mengidentifikasi identitas nasional 2. Menumbuhkembangkan pola sikap dan pola pikir yang komprehensif kepada mahasiswa sebagai peserta didik mampu menganalisis identitas nasional dan Konstitusi Indonesia 	Identitas nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas nasional 2. Sejarah kelahiran paham nasionalisme 3. Perbedaan hakekat bangsa dan negara 4. Identitas nasional sebagai karakter bangsa 5. Proses berbangsa bernegara 6. Sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di Indonesia
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengantarkan mahasiswa sebagai peserta didik mampu memahami hak dan kewajiban warga Negara 2. Menumbuhkembangkan pola sikap dan pola pikir yang komprehensif kepada mahasiswa sebagai peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara. 	Hak dan Kewajiban Warga Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian konsep hak dan kewajiban warga Negara 2. Pengertian konsep hak dan kewajiban warga Negara menurut UUD 1945 3. Konsep bangsa, konsep Negara, konsep warga negara 4. Materi undang-undang kewarganegaraan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengantarkan mahasiswa sebagai peserta didik memiliki wawasan negara hukum 2. Menumbuhkembangkan kesadaran mahasiswa sbg peserta didik akan pentingnya penegakan Negara hukum di Indonesia 3. Menumbuhkembangkan pola sikap dan pola pikir yang komprehensif kepada mahasiswa sebagai peserta didik agar mampu berperan serta dalam menegakkan Negara hukum di Indonesia 4. Mengantarkan mahasiswa sebagai peserta didik memiliki konsep wawasan HAM 5. Menumbuhkembangkan kesadaran mahasiswa sebagai peserta didik akan pentingnya penegakkan HAM di Indonesia 6. Menumbuhkembangkan kesadaran mahasiswa sebagai peserta didik berperan serta dalam penegakkan HAM. 	Negara Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakekat Negara hukum 2. Ciri-ciri Negara hukum 3. Konsep Indonesia adalah Negara hukum 4. Politik hukum Indonesia 5. Hubungan Negara hukum dengan demokrasi 6. Hakikat HAM 7. Sejarah perkembangan HAM 8. HAM di Indonesia 9. HAM dan Demokrasi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengantarkan mahasiswa sebagai peserta didik mampu memahami demokrasi dan pendidikan demokrasi 2. Menumbuhkembangkan pola sikap dan pola 	Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian demokrasi 2. Pengertian pendidikan demokrasi 3. Sejarah pertumbuhan demokrasi 4. Teori dan konsep demokrasi

pikir yang komprehensif kepada mahasiswa sebagai peserta didik yang mampu memahami demokrasi dan pendidikan demokrasi		<ol style="list-style-type: none"> 5. Kaitan demokrasi dan bentuk pemerintahan 6. Pola pendidikan demokrasi 7. Implementasi pendidikan demokrasi 8. Esensi demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Mengantarkan mahasiswa sebagai peserta didik memahami geopolitik Indonesia	Geopolitik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Geopolitik 2. Hakekat Geopolitik 3. Geopolitik Indonesia
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengantarkan mahasiswa sebagai peserta didik memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara untuk bela Negara. 2. Mengantarkan mahasiswa sebagai peserta didik memiliki pola pikir dan pola sikap dan perilaku untuk cinta tanah air Indonesia 3. Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terbentuk daya tangkal sebagai Ketahanan Nasional 	Geostrategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian tentang Geostrategi 2. Hakekat ketahanan nasional 3. Sifat ketahanan nasional dan empat konsep dasar ketahanan nasional 4. Konsep asta gatra berpengaruh dalam mewujudkan ketahanan nasional 3. Hubungan komponen strategi antar gatra

Sumber: Dikutip dari silabus PKn Universitas Negeri Padang Kurikulum KKNi 2013 yang dirumuskan oleh Tim Dosen Mata Kuliah PKn

karakter bangsa memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya dan berkarakter bagi lulusan perguruan tinggi. Nilai-nilai dasar itu adalah Pancasila. Konsekuensinya adalah bahwa keseluruhan materi pembelajaran PKn harus disirami nilai-nilai Pancasila¹⁰. Pengertian nilai dasar harus difahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaannya setiap lulusan Perguruan Tinggi.

Kelima dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi dalam penyusunan dan pengembangan substansi kajian PKn di Perguruan Tinggi. PKn sebagai MPK mencerminkan pendidikan demokrasi, HAM dan persoalan kewarganegaraan lainnya berperspek-

tif Pancasila. Jadi, meskipun setiap bangsa sama-sama menyebut PKn sebagai *civic education, democracy education, civil education*¹¹, tetapi arah pengembangan kompetensi keilmuan PKn di perguruan tinggi Indonesia memiliki karakter sendiri. Nilai-nilai dasar Pancasila tersebut diintegrasikan pada substansi kajian pokok PKn dalam membentuk karakter bangsa, seperti yang terdapat dalam Tabel 1.

C. Penerapan Metode Diskusi pada Mata Kuliah PKn untuk Membentuk Karakter Mahasiswa

Hakekat Berdiskusi

Pemahaman secara umum diskusi merupakan kegiatan yang wajar dilakukan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Diskusi meli-

¹⁰ Lemhannas RI. 2011. *Pedoman, Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Lemhannas RI.

¹¹ Iriyanto Widisuseno 2006. *Pengembangan MPK dalam Perspektif Filosofi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

batkan keterampilan berbicara, dalam ragam budaya masyarakat Indonesia yang bisa terwujud dalam berbagai bentuk.

Di antara rutinitas kegiatan berbicara dalam kehidupan manusia sehari-hari adalah “mengobrol”. Kegiatan obrolan menurut Yurmaini Maimudin¹² bercirikan antara lain: 1) dilakukan tanpa tujuan yang pasti, sebab pada umumnya dilakukan untuk menambah keakraban, memperluas pergaulan, atau bahkan hanya untuk mengisi waktu luang; 2) dapat dilakukan di mana pun dan dalam situasi bagaimana pun; 3) bisa dilaksanakan kapan pun dan dalam batas waktu tak tertentu; 4) dapat dilakukan oleh siapa pun dengan siapa saja, tanpa klasifikasi dan kesamaan arah; dan 5) tidak memerlukan sarana dan fasilitas.

Sementara itu hakekat dari berdiskusi bisa dilihat dari asal katanya yakni dari bahasa Latin *discussio* atau *discussi*, atau *discussum* yang memiliki arti memeriksa, memperbincangkan, dan membahas. Sedangkan dalam bahasa Inggris, *discussion*; berarti perundingan atau pembicaraan, sedangkan dalam bahasa Indonesia, sebagai istilah, diskusi berarti proses bertukar pikiran antara dua orang atau lebih tentang suatu masalah untuk mencapai pemahaman tertentu¹³.

¹² Yurmaini Maimudin, dkk. 1980. *Metode Diskusi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

¹³ Sugeng, 1981. *Op cit*.

Dari uraian di atas tampak bahwa berdiskusi bukanlah hanya sekedar keterampilan berbicara atau mengobrol semata. Diskusi merupakan kegiatan berbicara bersama yang dilakukan dengan: 1) tujuan untuk mencari kebenaran (ilmiah); 2) dilakukan dalam situasi resmi di tempat yang formal, meski kadang diskusi nonformal bisa dilakukan di tempat tak formal; 3) dilakukan oleh kalangan yang mencari kebenaran atau meningkatkan kualitas kebenaran; 4) dilaksanakan dalam kelola waktu yang terprogram secara proporsional; 5) diperlukan sarana dan peralatan sesuai dengan tingkat dan kualitas diskusi.

Berdiskusi Bukan Hanya Sekedar Bertanya-Jawab

Sebagaimana lazimnya yang disaksikan dalam diskusi adalah aktivitas verbal dalam wujud berbicara. Hal demikian mengindikasikan suatu keterampilan verbal yang dimiliki oleh seorang, termasuk di dalamnya adalah keterampilan bertanya dan menjawab. Menurut Hasibuan dan Moedjiono¹⁴ bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respons seseorang yang dikenal. Maksud respon adalah berupa pengetahuan dan hal yang butuh pertimbangan. Dalam proses pembelajaran, tanya jawab menurut Soetomo¹⁵ adalah

¹⁴ Hasibuan dan Moedjiono. 1986. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya,

¹⁵ Soetomo. 1993. *Dasar-dasar Interaksi Belajar Mengajar*. Surabaya: Usaha Nasional.

suatu metode dimana guru menggunakan/ memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawab, atau sebaliknya siswa bertanya pada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa ataupun antar siswa. Tujuan dari tanya jawab ini menurut Djamarah dan Zain¹⁶ adalah untuk meneliti kemampuan siswa dalam memahami suatu bacaan yang dibacanya atau ceramah yang sudah didengarnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berdiskusi bukanlah bertanya-jawab. Pada hakikatnya metode tanya-jawab berusaha menanyakan apakah murid telah mengetahui fakta-fakta tertentu yang sudah diajarkan. Dalam hal lain siswa juga bermaksud ingin mengetahui tingkat-tingkat proses pemikiran sesama murid. Melalui metode tanya-jawab guru ingin mencari jawaban yang tepat dan faktual. Sebaliknya dengan metode diskusi, lebih kepada tukar pikiran, ide, informasi ataupun pemahaman antar sesama peserta diskusi termasuk guru. Jika ada pertanyaan hanya bermaksud untuk merangsang siswa menggunakan fakta-fakta yang dipelajari untuk memecahkan suatu persoalan. Pertanyaan seperti ini biasanya tidak mempunyai jawaban yang tepat dan tunggal, melainkan lebih dari sebuah jawaban.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa metode tanya-jawab mempunyai wilayah yang saling mencakup dengan metode diskusi, sehingga kadang-kadang sukar

dibedakan tentang metode apakah yang sedang dipakai oleh Guru dalam suatu kelas. Tetapi lepas dari kenyataan bahwa kedua metode ini sering sukar dibedakan, tujuan dan teknik masing-masing metode cukup mempunyai perbedaan yang besar sehingga dalam uraian ini seyogyanya dibedakan.

Kesederhanaan Berdiskusi

Pengertian diskusi secara etimologis berasal dari bahasa Latin *discussio*, *discussi*, atau *discussum* yang berarti memeriksa, memperbincangkan, dan membahas¹⁷. Dalam bahasa Inggris, *discussion* berarti perundingan atau pembicaraan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, sebagai istilah, diskusi berarti proses bertukar pikiran antara dua orang atau lebih tentang suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu.

Kegiatan diskusi dapat dilakukan oleh dua orang ataupun lebih, puluhan, bahkan ratusan atau ribuan, dalam situasi resmi ataupun tak resmi, dengan persiapan yang matang dan terencana disertai dengan aturan yang jelas, atau kegiatan berbicara di tempat tak resmi dengan tujuan tertentu. Berbicara boleh berbeda, tetapi tetap merupakan satu kesatuan, menghasilkan ide-ide meskipun berbeda, tetapi tetap satu tujuan, bukan kehendak pribadi, melainkan tujuan kelompok, diwarnai dialog, tanya jawab, atau saling tukar pendapat, beradu argumentasi dengan bukti dan alasan; boleh ada penolakan pendapat atau gagasan, memberi

¹⁶ Djamarah dan Aswan Zain. 1996. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rieneka Cipta.

¹⁷ Sugeng, 1981. *Op cit*.

tanggapan, saran, kritik, dan usul; di sisi lain dapat dikemukakan informasi lengkap dan terperinci membawa hasil baik berupa kesimpulan, kesepakatan, pemikiran alternatif, dan lain-lain sebagai hasil pemikiran bersama.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada umumnya diskusi adalah suatu proses penglibatan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau sasaran yang sudah tertentu melalui cara tukar menukar informasi (*information sharing*), mempertahankan pendapat (*self-maintenance*) atau pemecahan masalah (*problem-solving*).

Dari pengertian di atas Yurmaini Maimudin¹⁸ mengemukakan prinsip dasar atau aturan-aturan dari diskusi, yaitu: 1) Menghindari terjadinya debat kusir, yakni perselisihan pendapat yang terjadi, tetapi tanpa dilandasi alasan yang jelas, 2) menyanggah atau menolak pendapat orang lain harus didasari oleh argumentasi-argumentasi yang kuat dan meyakinkan, 3) dalam diskusi setiap peserta dituntut untuk aktif menyampaikan pendapat-pendapatnya. Bahkan, seringkali terjadi saat seseorang menyampaikan pendapatnya, teman yang lain menyelanya, 4) tidak ada pemenang dalam diskusi; yang dicari atau didapat dari diskusi adalah mufakat atau kesepakatan bersama yang

didapat dari berbagai pendapat yang ada.

Dari prinsip dasar diskusi yang dikemukakan oleh Yurmaini Maimudin di atas hanya membahas diskusi pada waktu terjadi. Sementara itu, jika dipahami diskusi itu adalah tukar pikiran, tentu yang paling mendasar adalah saat sebelum diskusi dilakukan. Artinya, sebelum diskusi dilaksanakan tentu harus ada topik diskusi terlebih dahulu sehingga diskusi tidak mengarah pada debat kusir. Lebih lanjut, tentu setiap orang atau peserta diskusi terlebih dahulu memiliki pemahaman atau informasi terhadap topik sehingga terjadi saling tukar pikiran dengan peserta diskusi lainnya.

Kesimplean Berdiskusi.

Dalam kegiatan belajar mengajar diskusi merupakan interaksi antara siswa dan siswa atau antara siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Dalam diskusi selalu ada pokok yang menjadi bahan pembicaraan. Dalam pelaksanaannya cukup simpel, yakni ;

- a. Tahap Persiapan. Diskusi yang baik tidak akan terjadi begitu saja, artinya asal membagi kelompok-kelompok kecil lalu disuruh berdiskusi saja. Hal itu membutuhkan persiapan yang cermat seperti halnya *lesson planning*. Hanya bedanya dalam hal ini metode yang

¹⁸ Yurmaini Maimudin, dkk. 1980. *Op cit.*

dipergunakan adalah metode diskusi.

- b. Tahap Pelaksanaan, fase ini tersusun atas prinsip kontinu, yakni: 1) Pembukaan Diskusi; Dalam pembukaan diskusi yang perlu diperhatikan adalah penciptaan prakondisi sehingga perhatian dan sikap mental peserta digiring dan disiapkan agar terkonsentrasi pada hal-hal yang akan dibicarakan dalam diskusi; 2) Pemeliharaan Diskusi; Dalam pemeliharaan ini sebaiknya diterapkan bentuk-bentuk *reinforcement* sehingga mendorong peserta untuk berpartisipasi secara aktif. Pemeliharaan perasaan itu sangat penting yang menyebabkan seseorang merasa dihargai dan diperhatikan serta diikutsertakan sehingga mendorong timbulnya sikap bertanggungjawab dan rasa memiliki.
- c. Tahap Penutupan diskusi. Agar para peserta menjadi mantap dan tidak merasa mengambang akan hasil diskusinya maka dalam penutupan diskusi harus segera dibuatkan rangkuman dan kesimpulan yang tepat dan jelas. Kalau terpaksa dalam menyimpulkan diskusi itu terjadi kompromi maka jangan biarkan diskusi itu menjadi terkatung-katung.

D. Implementasi Metode Diskusi dalam PKn

Untuk menghindari diskusi dalam pembelajaran PKn, bukan sekedar obrolan biasa atau hanya keterampilan berbicara semata tetapi meru-

pakkan tukar pikiran tentang ide, informasi Oleh karena itu, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh peserta diskusi adalah pemahamannya terhadap topik yang akan didiskusikan. Sebab, mana mungkin seseorang bisa saling menukar informasi, sedangkan dia sendiri tidak punya informasi apalagi memahami informasi tersebut. Untuk itu sebelum perkuliahan harus di tentukan topik ataupun tema diskusi.

Persoalan yang dihadapi dalam perkuliahan PKn adalah banyak mahasiswa yang ikut dalam berdiskusi tidak memiliki informasi, ide, pemahaman terhadap topik diskusi. Untuk itu perlu adanya setiap mahasiswa memiliki informasi, ide atau pemahaman tentang topik diskusi dengan cara adanya beberapa orang untuk memaparkan topik diskusi 3 sampai 4 orang. Sementara itu mahasiswa lainnya juga harus memiliki informasi dengan cara menceknya disaat absen. Pengecekan ini dilakukan secara acak, mengingat keterbatasan waktu kuliah sehingga tidak ada lagi mahasiswa yang tidak memiliki informasi. Dampaknya mahasiswa berdiskusi bukan berdebat kusir.

Dalam PBM diminta pada sekelompok (maximal 4 orang) mahasiswa untuk tampil mempresentasikan materi perkuliah sesuai dengan topik yang ada pada silabus yang sudah disusun. Kelompok yang tampil tidak ditentukan setiap pertemuan tetapi bagi siapa saja yang mau. Hal ini berguna untuk menimbulkan kesadaran diri mahasiswa. Materi yang disajikan berupa resume ataupun essei. Masing-masing anggota

kelompok menulis dengan tulisan tangan supaya tidak terjadi perbuatan *copy paste*. Dengan mencatat resume tersebut mahasiswa diharapkan bisa memahaminya.

Dalam mempresentasikan materi dianjurkan atau ditugaskan anggota kelompok penyaji menjelaskannya dengan *power point* sehingga mereka punya keterampilan untuk menyajikan materi layaknya seorang guru/dosen. Sedangkan mahasiswa lainnya mencari bahan perkuliahan baik dari buku-buku, majalah, koran ataupun di internet. Bahan-bahan inilah nantinya disampaikan dalam diskusi dengan mengkritik, menyorankan dan menambahkan sesuai urutan sub materi, sehingga yang menguasai materi tidak saja kelompok penyaji tetapi mahasiswa lainnya juga memahami materi tersebut. Ini dimaksudkan supaya metode diskusi, lebih kepada tukar pikiran ide, informasi, ataupun pemahaman antar sesama diskusi termasuk dosen. Jika ada pertanyaan hanya bermaksud untuk merangsang siswa menggunakan fakta-fakta yang dipelajari untuk memecahkan suatu persoalan.

Selanjutnya, masing-masing anggota kelompok penyaji memberikan komentar atau tanggapannya terhadap kritikan, saran, dan tambahan yang diberikan oleh mahasiswa tadi. Setelah itu, diberikan kesempatan kepada mahasiswa lainnya untuk mengomentari tanggapan kelompok penyaji tersebut, begitu seterusnya sampai pada sub materi terakhir pada pertemuan tersebut. Dengan metode ini mahasiswa akan

memiliki kemampuan untuk mencari informasi (teori-teori, peristiwa-peristiwa), menyampaikan informasi, dan memberikan tanggapan terhadap informasi tersebut sehingga menjadi 'nilai' dalam kehidupan sehari-hari

E. Penutup

Dimensi PKn adalah menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan. Bagi mahasiswa hal ini berguna untuk mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, berfikir kritis terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila.

Untuk itu diperlukan pemahaman yang sederhana dari metode diskusi dan simpelnya pelaksanaan metode diskusi ini. Secara sederhana berdiskusi bukanlah bertanya-jawab. Metode diskusi, lebih kepada tukar pikiran ide, informasi ataupun pemahaman antar sesama diskusi termasuk guru. Jika ada pertanyaan hanya bermaksud untuk merangsang siswa menggunakan fakta-fakta yang dipelajari untuk memecahkan suatu persoalan. Dalam pelaksanaannya cukup simpel, yakni dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutupan.

Metode diskusi yang dikembangkan adalah kemampuan bertukar informasi, menyampaikan ide, berfikir kritis dan tanggap terhadap permasalahan dari peristiwa, fakta dan informasi yang diperoleh. Kemudian sanggup menggeneralisasi-

kannya yang akhirnya menjadi suatu 'nilai' bagi dalam membentuk karakter. Menganalisis materi perkuliahan dengan teori, contoh, fakta atau

peristiwa yang terjadi baik maupun buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian menganalisisnya bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Azis Wahab. 1999. "Kurikulum PPKn 1994: Isu dan Permasalahan untuk Penyempurnaan". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Th. Ke-5, No. 18, hal. 49 - 59.
- Djamarah dan Aswan Zain. 1996. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Gunaryadi. 2012. "Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan Nasional". *Ceramahan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan*. Jakarta: 24 September 2012.
- Hasibuan dan Moedjiono. 1986. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Hess, Diana. 2001. "Teaching to Public Controversy in a Democracy". Bloomington, IN: ERIC. *Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education*, Inteenational Civic Education and Civitas, pp. 87-109.
- Iriyanto Widisuseno 2006. *Pengembangan MPK dalam Perspektif Filosofi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan Nasional RI. 2006. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional RI.
- Koento Wibisono. 2006. "Revitalisasi dan Reorientasi MPK". *Makalah Simnas III Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta, 2006.
- Lemhannas RI. 2011. *Pedoman, Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Samsuri. 2010. "Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi PKN di Indonesia: Studi Pengembangan Kebijakan PKN pada Jejang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi". *Disertasi Tidak Diterbitkan*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- SiswonoYudohusodo. 2005. *Pancasila, Globalisasi, dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.

- Soetomo. 1993. *Dasar-dasar Interaksi Belajar Mengajar*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sugeng Paranto. 1981. *Teknik Diskusi dan Aspek-aspek yang Perlu Diperhatikan Dalam Pelaksanaanya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yurmaini Maimudin, dkk. 1980. *Metode Diskusi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.